E-ISSN: 3025-0994
Halaman 3810-3824
Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026

Pengeluaran Pangan sebagai Cermin Ketimpangan Kesejahteraan Antarwilayah di Indonesia, 2019–2025

Puspa Dewangga[1] , Dheavivi Ayu Dian Pebrian[2]

[1,2] Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo
e-mail: puspadewangga@uho.ac.id

Abstrak

Pangsa pengeluaran pangan merupakan indikator kesejahteraan yang mencerminkan kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan nonpangan dan berkaitan dengan hukum Engel. Namun, peningkatan pengeluaran masyarakat belum tentu menunjukkan perbaikan kesejahteraan yang merata antarwilayah. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan pangsa pengeluaran pangan nasional, mengukur ketimpangan antarprovinsi dan perkotaan–perdesaan, mengidentifikasi hubungan antara pengeluaran per kapita dan pangsa pangan, serta mengevaluasi posisi provinsi-provinsi di Sulawesi selama 2019–2025. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan data sekunder dari tujuh publikasi Badan Pusat Statistik berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret. Analisis dilakukan melalui statistik deskriptif, koefisien variasi, selisih pangsa pangan perkotaan–perdesaan, dan estimasi hubungan Engel lintas provinsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pangsa pangan nasional relatif stagnan pada 49,14–49,42 persen, meskipun pengeluaran per kapita nominal meningkat 34,7 persen. Ketimpangan antarprovinsi pada 32 provinsi dengan wilayah tetap meningkat, ditunjukkan oleh kenaikan koefisien variasi dari 7,75 menjadi 8,33 persen dan bertambahnya provinsi dengan pangsa pangan di atas 50 persen. Kesenjangan perdesaan–perkotaan melebar dari 9,69 menjadi 10,81 poin persen, sementara hubungan negatif pengeluaran per kapita dan pangsa pangan semakin kuat. Seluruh provinsi di Sulawesi mengalami kenaikan pangsa pangan, terutama Gorontalo dan Sulawesi Tenggara. Temuan ini menunjukkan bahwa pemulihan pengeluaran belum disertai perbaikan struktur konsumsi yang merata. Pangsa pangan relevan digunakan sebagai indikator pelengkap dalam pemantauan ketimpangan kesejahteraan wilayah.

Kata Kunci: Hukum Engel; Ketimpangan Wilayah; Kesejahteraan; Pangsa Pengeluaran Pangan

Abstract

The food expenditure share is a welfare indicator reflecting households' capacity to meet non-food needs and is closely associated with Engel's law. However, rising household expenditure does not necessarily indicate an equitable improvement in welfare across

regions. This study aimed to examine the development of Indonesia's food expenditure share, measure inequality across provinces and between urban and rural areas, identify the relationship between per capita expenditure and food expenditure share, and assess the position of Sulawesi provinces during 2019–2025. A quantitative descriptive approach was applied using secondary data from seven Statistics Indonesia publications based on the March National Socioeconomic Survey. The analysis employed descriptive statistics, the coefficient of variation, urban–rural food expenditure share differences, and cross-provincial Engel curve estimation. The results show that the national food expenditure share remained relatively stable at 49.14–49.42 percent, despite a 34.7 percent increase in nominal per capita expenditure. Provincial inequality among 32 provinces with unchanged boundaries increased, as indicated by the coefficient of variation rising from 7.75 to 8.33 percent and an increase in the number of provinces with food expenditure shares exceeding 50 percent. The rural–urban gap widened from 9.69 to 10.81 percentage points, while the negative relationship between per capita expenditure and food expenditure share strengthened. All Sulawesi provinces recorded increases in food expenditure shares, particularly Gorontalo and Southeast Sulawesi. These findings indicate that expenditure recovery has not been accompanied by an equitable improvement in consumption structure. Food expenditure share provides a relevant complementary indicator for monitoring regional welfare inequality.

Keywords: Engel's Law; Food Expenditure Share; Regional Inequality; Welfare

LATAR BELAKANG

Tingkat dan komposisi konsumsi rumah tangga merupakan salah satu cerminan paling langsung dari hasil pembangunan suatu wilayah. Konsumsi nasional adalah komponen penting produk domestik bruto dan faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil (Zhang, 2024). Namun, kenaikan pendapatan tidak otomatis menjelma menjadi perbaikan pola konsumsi yang merata. Pengalaman Tiongkok menunjukkan bahwa kelas menengah makmur memang tumbuh pesat, tetapi kontribusinya terhadap pertumbuhan konsumsi agregat lebih kecil dari yang diharapkan karena kecenderungan mengonsumsi dari pendapatannya rendah dan perluasannya terbatas pada kelompok perkotaan Yang et al. (2024). Pola konsumsi juga terus berubah mengikuti perubahan global, sehingga konsumsi perlu dipahami sebagai bagian dari proses reproduksi ekonomi yang melibatkan seluruh pelaku pada semua tingkat (Nikiforov, 2025).

Di antara berbagai keteraturan empiris dalam ekonomi konsumsi, hukum Engel termasuk yang paling kokoh: pangsa anggaran untuk pangan menurun ketika pendapatan meningkat, atau dengan kata lain elastisitas pendapatan permintaan pangan lebih kecil dari satu (Clements & Selvanathan, 1992). Kaber-Hriday & Islam-Liton (2024) menegaskan bahwa ketika pendapatan keluarga naik, pangsa pengeluaran pangan menurun walaupun nilai absolut pengeluaran pangan dapat bertambah, dan hukum ini tetap relevan lebih dari 150 tahun setelah pertama kali dirumuskan. Studi di Malaysia mengelompokkan pangan sebagai barang kebutuhan pokok (*necessity*) dengan elastisitas pendapatan di bawah satu (Yusof & Duasa, 2010), sedangkan studi rumah tangga di Nepal menemukan bahwa rumah

tangga termiskin membelanjakan porsi pendapatan terbesar untuk pangan, yaitu 31 persen, dibandingkan 8 persen pada rumah tangga terkaya, serta bahwa rumah tangga berpendapatan rendah memiliki elastisitas pengeluaran pangan yang lebih tinggi (Aryal & Aryal, 2023). Keteraturan inilah yang menjadikan pangsa pengeluaran pangan lazim dipakai sebagai indikator tidak langsung kesejahteraan: makin besar porsi anggaran yang terserap untuk makan, makin sempit ruang rumah tangga untuk membiayai pendidikan, kesehatan, perumahan, dan tabungan.

Di Indonesia, bukti terbaru menunjukkan transformasi struktural konsumsi rumah tangga yang sejalan dengan hukum Engel. Farandy et al. (2026) menemukan bahwa antara 2013 dan 2023 pangsa pengeluaran pangan strategis menurun seiring kenaikan pendapatan, disertai transisi pola makan dari bahan pokok seperti beras menuju pangan olahan. Meskipun demikian, beras tetap krusial bagi rumah tangga berpendapatan rendah yang permintaannya sangat inelastis, dan kenaikan harga beras menimbulkan kerugian kesejahteraan paling besar pada kuartil termiskin. Arifin et al. (2019) menunjukkan bahwa permintaan pangan Indonesia ditentukan oleh permintaan yang sudah ada, pendapatan, harga dan komposisinya, serta bahwa konsumsi pangan berbeda tajam menurut kelompok pendapatan, wilayah perkotaan dan perdesaan, serta provinsi. Konsumsi beras, misalnya, tertinggi di Bali dan terendah di Papua, perbedaan yang dikaitkan dengan ketersediaan pangan, pola pangan pokok lokal, dan rendahnya pendapatan rumah tangga. Pada tingkat regional, Nurhaliza et al. (2026) mengonfirmasi berlakunya hukum Engel pada 13.933 rumah tangga perkotaan di enam provinsi Sulawesi berdasarkan Susenas 2023, dengan elastisitas yang berbeda antarprovinsi sehingga intervensi yang seragam dinilai kurang tepat.

Ketimpangan konsumsi tidak hanya terjadi antarkelompok pendapatan, tetapi juga antarwilayah. Kajian tren konsumsi pangan di Tiongkok menunjukkan bahwa konsumsi perdesaan tertinggal jauh dari perkotaan, bahwa pola dan tingkat konsumsi pangan berbeda antardaerah terutama karena perbedaan pendapatan lokal, ketersediaan pangan, dan latar belakang etnis, serta bahwa konvergensi konsumsi berlangsung, tetapi lambat (Zhou et al., 2012). Di Malaysia, pola konsumsi rumah tangga perdesaan dan perkotaan dibentuk oleh gaya hidup, nilai, motif, preferensi, dan bauran pemasaran (Sulaiman, Mat, et al., 2018). Ketidakstabilan ekonomi akibat lonjakan inflasi juga ikut mengubah pola konsumsi masyarakat (Sulaiman, Shamsudin, et al., 2020). Telaah tentang konsumsi barang tahan lama di perdesaan India juga menegaskan bahwa pola konsumsi dipengaruhi norma budaya, kondisi ekonomi, preferensi pribadi, dan kemajuan teknologi, serta peka terhadap fluktuasi ekonomi (Mehra, 2025).

Literatur ekonomi perilaku mengingatkan bahwa keputusan konsumsi tidak sepenuhnya ditentukan oleh pendapatan. Konsumen dipengaruhi oleh bias status quo, penghindaran kerugian, dan akuntansi mental (Simnica, 2021), dan pemahaman tentang perilaku tersebut makin banyak dipakai dalam perumusan kebijakan konsumen (Reisch & Zhao, 2017). Telaah atas model-model perilaku konsumen sejak 1935 hingga 2021 memperlihatkan bahwa perilaku konsumsi lahir dari interaksi faktor ekonomi, psikologis, dan sosial (Reina Paz & Rodríguez Vargas, 2023). Pergeseran preferensi ini tampak, antara lain, pada tumbuhnya kategori pangan baru seperti pangan fungsional yang sebagian besar dibeli secara daring (Park & Kwon, 2026). Implikasinya, pangsa pangan yang tinggi tidak semata-

mata mencerminkan rendahnya pendapatan, tetapi juga dipengaruhi struktur harga, kebiasaan makan, dan pilihan konsumsi setempat, sehingga perbandingan antarwilayah perlu dibaca dengan cermat.

Periode 2019–2025 memberikan ruang pengamatan yang khas. Periode ini mencakup kondisi sebelum pandemi COVID-19, guncangan pandemi pada 2020–2021, fase pemulihan sesudahnya, serta pemekaran wilayah Papua yang menambah jumlah provinsi dari 34 menjadi 38. Selama periode tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) menerbitkan statistik pengeluaran konsumsi per provinsi setiap tahun berdasarkan Susenas Maret; edisi terbaru bahkan sudah memuat 38 provinsi untuk Maret 2024 dan 2025 (Badan Pusat Statistik, 2025). Data ini memungkinkan pengamatan berkelanjutan atas pangsa pangan seluruh provinsi, baik di perkotaan maupun perdesaan.

Telaah literatur tersebut memperlihatkan tiga celah. Pertama, studi di Indonesia umumnya mengestimasi elastisitas permintaan dari data mikro rumah tangga pada satu atau dua titik waktu, misalnya Susenas 2017 sebagai dasar proyeksi permintaan pangan (Arifin et al., 2019), perbandingan Susenas 2013 dan 2023 (Farandy et al., 2026), serta Susenas 2023 untuk rumah tangga perkotaan Sulawesi (Nurhaliza et al., 2026), sehingga pangsa pangan jarang dibaca sebagai indikator ketimpangan kesejahteraan antarwilayah dalam rentang tahunan yang berkesinambungan. Kedua, studi yang mencakup Sulawesi masih terbatas pada rumah tangga perkotaan, sehingga perbandingan perkotaan dan perdesaan serta pergeseran posisi antarprovinsi belum terpetakan. Ketiga, belum terdokumentasi apakah periode pandemi dan pemulihan mempersempit atau justru memperlebar kesenjangan pangsa pangan antarwilayah. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menggambarkan perkembangan pangsa pengeluaran pangan nasional di perkotaan dan perdesaan selama 2019–2025; (2) mengukur ketimpangan pangsa pangan antarprovinsi dan perubahannya; (3) menilai konsistensi hubungan antara pengeluaran per kapita dan pangsa pangan lintas provinsi dengan hukum Engel; dan (4) mengidentifikasi posisi provinsi-provinsi di Sulawesi, khususnya Sulawesi Tenggara.

TIPE ARTIKEL

Artikel ini merupakan artikel asli hasil penelitian (*original research article*) dengan pendekatan deskriptif kuantitatif yang memetakan pangsa pengeluaran pangan sebagai indikator ketimpangan kesejahteraan antarwilayah di Indonesia menggunakan data sekunder resmi tingkat provinsi. Kontribusi utamanya berupa pengukuran dan interpretasi pola ketimpangan selama tujuh tahun pengamatan, bukan pengujian hipotesis kausal. Artikel ditulis dalam Bahasa Indonesia mengikuti sistematika Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan data sekunder dari tujuh publikasi BPS yang menyajikan hasil modul konsumsi Susenas Maret. Kondisi sebelum pandemi diwakili oleh data Maret 2019 (Badan Pusat Statistik, 2019). Periode pandemi tercakup dalam data Maret 2020 (Badan Pusat Statistik, 2020) dan Maret 2021 (Badan Pusat Statistik, 2021). Fase pemulihan diamati melalui data Maret 2022 (Badan

Pusat Statistik, 2022) dan Maret 2023 (Badan Pusat Statistik, 2023), yaitu tahun terakhir dengan 34 provinsi. Data 38 provinsi tersedia sejak Maret 2024 (Badan Pusat Statistik, 2024) dan data terbaru adalah Maret 2025 (Badan Pusat Statistik, 2025). Unit analisis adalah provinsi, dengan 34 provinsi pada 2019–2023 dan 38 provinsi pada 2024–2025. Variabel yang dianalisis disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Definisi operasional	Satuan	Sumber
Pangsa pengeluaran pangan (*w*)	Pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan dibagi total pengeluaran per kapita sebulan dikali 100, disajikan untuk perkotaan, perdesaan, dan gabungan	Persen	Susenas Maret, BPS
Pengeluaran per kapita (*X*)	Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan dan bukan makanan (nilai nominal)	Rupiah	Susenas Maret, BPS
Selisih perdesaan–perkotaan (*G*)	Pangsa pangan perdesaan dikurangi pangsa pangan perkotaan pada provinsi yang sama	Poin persen	Diolah
Koefisien variasi (KV)	Simpangan baku dibagi rata-rata pangsa pangan antarprovinsi dikali 100	Persen	Diolah

Sumber: BPS (2019–2025), diolah.

Pemekaran Papua membuat angka Provinsi Papua dan Papua Barat sebelum dan sesudah 2024 tidak dapat dibandingkan secara langsung karena cakupan wilayahnya berubah. Oleh sebab itu, analisis tren ketimpangan dilakukan pada 32 provinsi yang wilayahnya tetap selama periode pengamatan, sedangkan enam provinsi di Tanah Papua dibahas secara terpisah. DKI Jakarta tidak memiliki wilayah perdesaan, sehingga angka gabungannya sama dengan angka perkotaan dan provinsi ini dikeluarkan dari perhitungan selisih perdesaan–perkotaan. Seluruh nilai pengeluaran adalah nilai nominal; karena itu, perubahan tingkat pengeluaran antartahun dibaca secara hati-hati, sedangkan pangsa pangan sebagai rasio tidak dipengaruhi satuan harga.

Teknik Analisis

Analisis dilakukan dalam empat tahap. Pertama, statistik deskriptif berupa rata-rata, simpangan baku, nilai minimum, nilai maksimum, dan rentang pangsa pangan antarprovinsi dihitung untuk setiap tahun. Kedua, ketimpangan relatif antarprovinsi diukur dengan koefisien variasi (KV):

$$\mathrm{KV} = \frac{s}{\bar{w}} \times 100 \qquad (1)$$

dengan s adalah simpangan baku dan $\bar{w}$ adalah rata-rata pangsa pangan antarprovinsi. Kenaikan KV dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa pangsa pangan antarprovinsi makin menyebar, atau ketimpangan melebar. Ketiga, kesenjangan perkotaan dan perdesaan diukur sebagai selisih pangsa pangan perdesaan dikurangi perkotaan dalam

poin persen. Keempat, hubungan Engel lintas provinsi diringkas dengan bentuk Working–Leser, yang menyatakan bahwa pangsa anggaran pangan merupakan fungsi linear dari logaritma pendapatan (Clements & Selvanathan, 1992):

$$w_i = \alpha + \beta \ln X_i + \varepsilon_i \quad (2)$$

dengan w_i adalah pangsa pangan provinsi *i* dan X_i adalah pengeluaran per kapita sebulan. Persamaan ini diestimasi dengan metode kuadrat terkecil biasa pada data lintas provinsi tiap tahun dan dibaca sebagai ringkasan deskriptif, bukan hubungan kausal. Koefisien β yang negatif menunjukkan pola yang konsisten dengan hukum Engel; makin besar nilai absolutnya, makin tajam perbedaan pangsa pangan antara provinsi berpengeluaran tinggi dan rendah. Kekuatan hubungan juga dilaporkan dengan koefisien korelasi Pearson (*r*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Pangsa Pengeluaran Pangan Nasional

Gambar 1 memperlihatkan bahwa pangsa pengeluaran pangan nasional nyaris tidak bergerak selama tujuh tahun pengamatan, yaitu 49,14 persen pada 2019 dan 49,42 persen pada 2025. Angka tersebut sempat melampaui 50 persen pada 2022 (50,14 persen) dan 2024 (50,10 persen). Padahal, pengeluaran per kapita sebulan secara nominal naik dari Rp1.165.241 pada 2019 (Badan Pusat Statistik, 2019) menjadi Rp1.569.088 pada 2025 (Badan Pusat Statistik, 2025), atau 34,7 persen. Menurut hukum Engel, kenaikan pengeluaran seharusnya diikuti penurunan pangsa pangan (Clements & Selvanathan, 1992), meskipun nilai absolut pengeluaran pangan tetap dapat bertambah (Kaber-Hriday & Islam-Liton, 2024). Bertahannya pangsa pangan menunjukkan bahwa kenaikan pengeluaran nominal tersebut belum menggeser struktur konsumsi ke arah nonpangan dan diduga banyak terserap oleh naiknya biaya pangan.

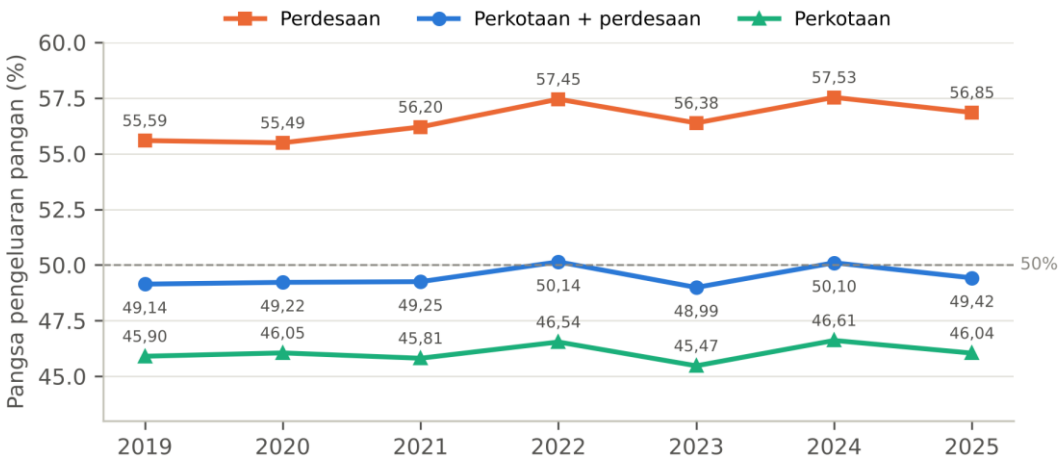

Gambar 1. Pangsa Pengeluaran Pangan Nasional Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2019–2025
Sumber: BPS (2019–2025), diolah.

Pangsa pangan tidak melonjak pada 2020 dan 2021, sehingga guncangan pandemi pada pangsa pangan nasional relatif tertahan. Tekanan justru tampak pada 2022 dan 2024, ketika pangsa pangan perdesaan mencapai 57,45 dan 57,53 persen. Temuan ini sejalan dengan pengamatan bahwa ketidakstabilan ekonomi dan lonjakan harga mengubah pola konsumsi rumah tangga (Sulaiman, Shamsudin, et al., 2020), serta dengan bukti bahwa kenaikan harga bahan pokok paling membebani kelompok termiskin yang permintaannya inelastis (Farandy et al., 2026). Dalam periode yang sama, pangsa pangan perkotaan relatif stabil di kisaran 45,5–46,6 persen, sedangkan pangsa pangan perdesaan naik dari 55,59 menjadi 56,85 persen. Akibatnya, selisih perdesaan–perkotaan melebar dari 9,69 poin persen pada 2019 menjadi 10,81 poin persen pada 2025, dengan puncak 10,92 poin persen pada 2024.

Ketimpangan Pangsa Pangan Antarprovinsi

Tabel 2 meringkas sebaran pangsa pangan pada 32 provinsi dengan wilayah tetap. Rata-rata pangsa pangan antarprovinsi naik dari 49,56 persen pada 2019 menjadi 50,19 persen pada 2025. Simpangan baku meningkat dari 3,84 menjadi 4,18 poin persen, dan koefisien variasi naik dari 7,75 menjadi 8,33 persen dengan puncak 8,48 persen pada 2022. Jumlah provinsi yang membelanjakan lebih dari separuh pengeluarannya untuk pangan bertambah dari 16 menjadi 18, setelah sempat mencapai 22 provinsi pada 2022 dan 2024. Secara keseluruhan, 24 dari 32 provinsi mencatat pangsa pangan yang lebih tinggi pada 2025 dibandingkan 2019. Dengan demikian, ketimpangan pangsa pangan antarprovinsi melebar, bukan menyempit, selama periode pandemi dan pemulihan.

Tabel 2. Statistik Deskriptif Pangsa Pengeluaran Pangan pada 32 Provinsi, 2019–2025

Tahun	Rata-rata	SB	KV (%)	Minimum	Maksimum	Rentang	Prov. > 50%	*r*	β
2019	49,56	3,84	7,75	40,70 (DKI)	57,21 (NTT)	16,51	16	-0,69	-11,86
2020	49,48	3,41	6,89	41,03 (DIY)	55,73 (NTT)	14,70	14	-0,64	-9,96
2021	49,42	3,84	7,77	39,54 (DKI)	56,56 (Aceh)	17,02	17	-0,66	-12,18
2022	50,69	4,30	8,48	37,75 (DKI)	57,46 (NTB)	19,71	22	-0,63	-12,83
2023	49,60	4,19	8,45	37,82 (DKI)	57,31 (Aceh)	19,49	18	-0,73	-14,24
2024	50,77	4,10	8,07	39,66 (DKI)	57,16 (NTB)	17,50	22	-0,76	-14,72
2025	50,19	4,18	8,33	38,93 (DKI)	57,09 (Aceh)	18,16	18	-0,78	-14,94

Keterangan: SB = simpangan baku; KV = koefisien variasi; Prov. > 50% = jumlah provinsi dengan pangsa pangan di atas 50 persen; *r* = korelasi Pearson antara ln pengeluaran per

kapita dan pangsa pangan; β = koefisien kemiringan persamaan (2). Provinsi Papua dan Papua Barat dikeluarkan karena wilayahnya berubah akibat pemekaran. Sumber: BPS (2019–2025), diolah.

Ketimpangan tersebut tampak lebih tajam bila keenam provinsi di Tanah Papua disertakan. Pada 2025, pangsa pangan 38 provinsi berkisar dari 38,93 persen di DKI Jakarta hingga 64,71 persen di Papua Pegunungan, dengan rentang 25,78 poin persen dan koefisien variasi 9,58 persen (Gambar 2). Rata-rata lima provinsi dengan pangsa pangan tertinggi mencapai 58,19 persen, sedangkan lima provinsi terendah hanya 42,17 persen. Kelompok terendah diisi oleh wilayah dengan pusat jasa, pariwisata, atau industri yang kuat, yaitu DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Bali, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Timur. Kelompok tertinggi diisi oleh Papua Pegunungan, Papua Tengah, Aceh, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

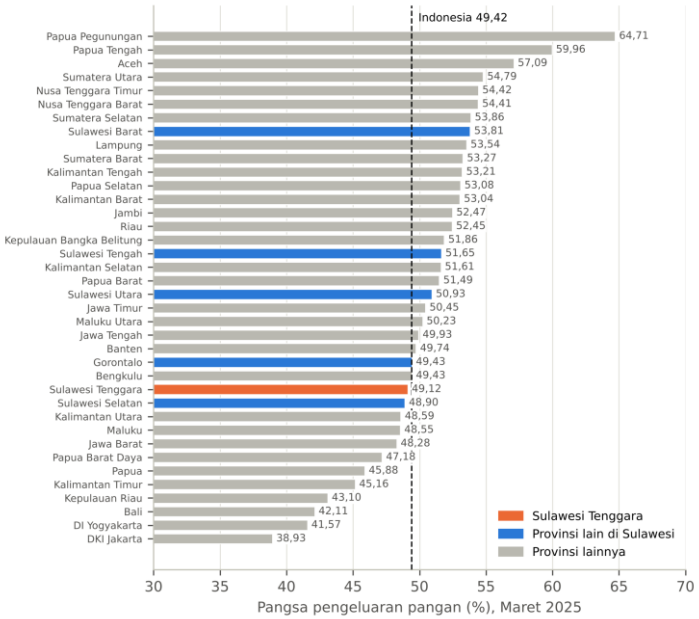

Gambar 2. Pangsa Pengeluaran Pangan Menurut Provinsi, Maret 2025
Sumber: BPS (2019–2025), diolah.

Pola ini sejalan dengan temuan bahwa perbedaan konsumsi pangan antardaerah terutama bersumber dari perbedaan pendapatan lokal, ketersediaan pangan, dan latar belakang budaya, serta bahwa konvergensi berlangsung lambat (Zhou et al., 2012). Pangsa pangan yang sangat tinggi di wilayah pegunungan dan tengah Papua juga konsisten dengan penjelasan Arifin et al. (2019) bahwa akses pangan di Papua dibatasi oleh ketersediaan pangan yang rendah dan pendapatan rumah tangga yang termasuk terendah di Indonesia. Sebaliknya, beberapa provinsi berpengeluaran relatif rendah justru memiliki pangsa pangan yang lebih kecil daripada yang diperkirakan dari tingkat pengeluarannya. Hal ini mengingatkan bahwa kebiasaan konsumsi dan preferensi turut menentukan alokasi

anggaran rumah tangga (Reina Paz & Rodríguez Vargas, 2023), termasuk faktor psikologis seperti bias status quo dan akuntansi mental (Simnica, 2021).

Tabel 3 merinci perubahan pangsa pangan per provinsi. Kenaikan terbesar pada provinsi dengan wilayah tetap terjadi di Gorontalo (4,26 poin persen), Kalimantan Tengah (2,65 poin), Sulawesi Tenggara (2,59 poin), Kepulauan Bangka Belitung (2,08 poin), dan Riau (2,03 poin). Penurunan terbesar terjadi di Nusa Tenggara Timur (–2,79 poin), Maluku (–2,06 poin), Bali (–1,81 poin), DKI Jakarta (–1,77 poin), dan Jawa Barat (–1,43 poin). Penurunan di Nusa Tenggara Timur menandakan perbaikan relatif di ujung bawah sebaran, tetapi penurunan di DKI Jakarta dan Bali justru memperlebar jarak terhadap provinsi berpangsa pangan tinggi.

Tabel 3. Pangsa Pengeluaran Pangan per Provinsi (persen), 2019, 2022, dan 2025

Provinsi	2019	2022	2025	Perubahan 2019–2025 (poin)	Selisih desa–kota 2025 (poin)	Pengeluaran per kapita 2025 (Rp)
Aceh	56,30	56,64	57,09	+0,79	10,83	1.299.756
Sumatera Utara	54,17	54,58	54,79	+0,62	10,33	1.397.887
Nusa Tenggara Timur	57,21	54,38	54,42	–2,79	13,35	1.028.875
Nusa Tenggara Barat	52,44	57,46	54,41	+1,97	4,87	1.402.118
Sumatera Selatan	52,04	54,03	53,86	+1,82	14,86	1.283.538
Sulawesi Barat	52,96	51,46	53,81	+0,85	9,57	1.069.314
Lampung	52,18	53,55	53,54	+1,36	7,58	1.239.613
Sumatera Barat	52,30	53,33	53,27	+0,97	8,58	1.542.109
Kalimantan Tengah	50,56	52,88	53,21	+2,65	8,15	1.596.165
Kalimantan Barat	51,94	54,04	53,04	+1,10	11,60	1.469.934
Jambi	52,44	52,54	52,47	+0,03	7,97	1.477.104
Riau	50,42	51,28	52,45	+2,03	9,72	1.610.427
Kepulauan Bangka Belitung	49,78	53,29	51,86	+2,08	7,07	1.765.551
Sulawesi Tengah	51,40	51,84	51,65	+0,25	8,62	1.256.394
Kalimantan Selatan	50,30	51,71	51,61	+1,31	7,11	1.603.501
Sulawesi Utara	49,36	54,51	50,93	+1,57	5,90	1.410.504
Jawa Timur	48,53	51,57	50,45	+1,92	8,93	1.419.140
Maluku Utara	50,12	51,85	50,23	+0,11	8,85	1.492.532
Jawa Tengah	49,08	51,06	49,93	+0,85	6,73	1.337.028
Banten	49,24	51,25	49,74	+0,50	15,15	1.750.546
Bengkulu	49,48	52,34	49,43	–0,05	13,74	1.498.744
Gorontalo	45,17	46,76	49,43	+4,26	11,92	1.315.738
Sulawesi Tenggara	46,53	48,13	49,12	+2,59	7,16	1.325.085
Sulawesi Selatan	47,72	49,56	48,90	+1,18	8,37	1.358.821
Kalimantan Utara	49,30	48,30	48,59	–0,71	6,45	1.726.451

Provinsi	2019	2022	2025	Perubahan 2019–2025 (poin)	Selisih desa–kota 2025 (poin)	Pengeluaran per kapita 2025 (Rp)
Maluku	50,61	50,39	48,55	–2,06	9,31	1.398.498
Jawa Barat	49,71	49,28	48,28	–1,43	11,39	1.724.367
Kalimantan Timur	44,78	45,25	45,16	+0,38	8,09	2.117.354
Kepulauan Riau	44,38	46,20	43,10	–1,28	13,27	2.468.319
Bali	43,92	42,27	42,11	–1,81	8,02	1.964.618
DI Yogyakarta	40,79	42,48	41,57	+0,78	11,00	1.843.212
DKI Jakarta	40,70	37,75	38,93	–1,77	–	2.962.412
Tanah Papua (wilayah berubah akibat pemekaran)						
Papua Barat[a]	48,79	49,97	51,49	n.b.	5,12	1.705.338
Papua Barat Daya	–	–	47,18	n.b.	1,34	1.816.875
Papua[a]	54,77	59,00	45,88	n.b.	5,59	1.810.767
Papua Selatan	–	–	53,08	n.b.	11,61	1.517.419
Papua Tengah	–	–	59,96	n.b.	13,78	1.459.088
Papua Pegunungan	–	–	64,71	n.b.	14,79	1.941.997
Indonesia	**49,14**	**50,14**	**49,42**	**+0,28**	**10,81**	**1.569.088**

Keterangan: provinsi diurutkan menurut pangsa pangan 2025 dari tertinggi; selisih desa–kota = pangsa pangan perdesaan dikurangi perkotaan; DKI Jakarta tidak memiliki wilayah perdesaan; [a] angka 2019 dan 2022 mencakup wilayah sebelum pemekaran; n.b. = tidak dapat dibandingkan. Sumber: BPS (2019, 2022, 2025), diolah.

Hubungan Pengeluaran per Kapita dan Pangsa Pangan Lintas Provinsi

Gambar 3 memperlihatkan bahwa hubungan antara pengeluaran per kapita dan pangsa pangan lintas provinsi negatif pada kedua ujung periode, sesuai dengan hukum Engel (Clements & Selvanathan, 1992) dan dengan sifat pangan sebagai barang kebutuhan pokok (Yusof & Duasa, 2010). Hubungan tersebut juga makin kuat. Koefisien korelasi pada 32 provinsi bergeser dari –0,69 pada 2019 menjadi –0,78 pada 2025, sedangkan koefisien β dalam bentuk Working–Leser berubah dari –11,86 menjadi –14,94. Artinya, pada 2019 provinsi dengan pengeluaran per kapita 10 persen lebih tinggi rata-rata memiliki pangsa pangan sekitar 1,13 poin persen lebih rendah; pada 2025 selisih itu membesar menjadi sekitar 1,42 poin persen. Rasio pengeluaran per kapita tertinggi (DKI Jakarta) terhadap terendah (Nusa Tenggara Timur) tetap sekitar 2,9 kali, sehingga yang melebar bukan kesenjangan tingkat pengeluaran, melainkan kesenjangan strukturnya.

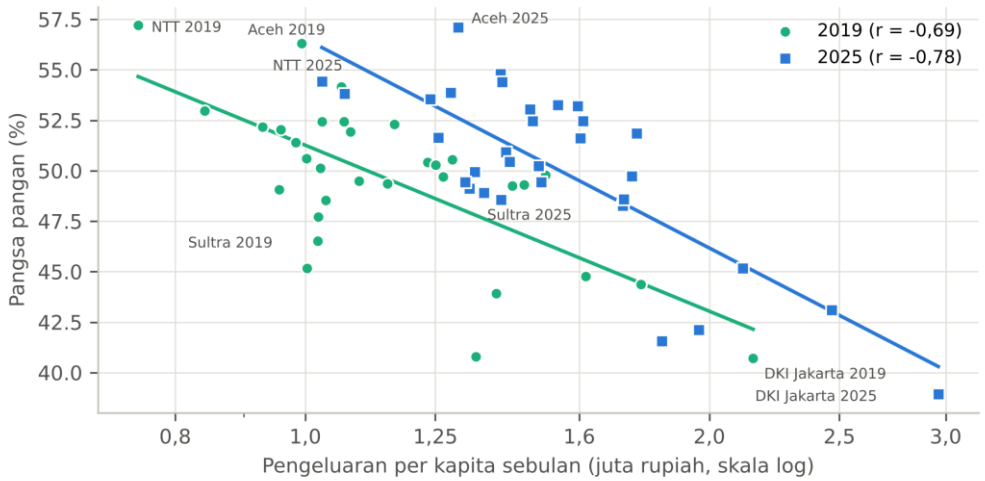

Gambar 3. Hubungan Pengeluaran per Kapita dan Pangsa Pangan pada 32 Provinsi, 2019 dan 2025

Sumber: BPS (2019–2025), diolah.

Temuan ini memperkuat bukti mikro bahwa rumah tangga berpendapatan rendah menanggung porsi pengeluaran pangan yang jauh lebih besar dan lebih peka terhadap perubahan pendapatan (Aryal & Aryal, 2023). Di Sulawesi, Nurhaliza et al. (2026) menemukan kurva elastisitas berbentuk lengkung, yaitu lemah pada kelompok berpendapatan rendah dan terkuat pada kelompok berpendapatan menengah. Penyimpangan dari garis Engel, misalnya pangsa pangan Aceh yang jauh di atas perkiraan menurut tingkat pengeluarannya, menunjukkan peran faktor nonpendapatan seperti harga lokal dan kebiasaan makan. Faktor perilaku semacam ini telah lama menjadi perhatian ekonomi perilaku dan kebijakan konsumen (Reisch & Zhao, 2017).

Kesenjangan Perkotaan dan Perdesaan

Rata-rata selisih pangsa pangan perdesaan dan perkotaan antarprovinsi berada di kisaran 9,0–9,5 poin persen setiap tahun, tetapi variasinya antarprovinsi besar (Tabel 3). Pada 2025, selisih terbesar terdapat di Banten (15,15 poin persen), Sumatera Selatan (14,86 poin), Papua Pegunungan (14,79 poin), dan Papua Tengah (13,78 poin). Selisih terkecil terdapat di Papua Barat Daya (1,34 poin) dan Nusa Tenggara Barat (4,87 poin). Selisih besar di Banten menunjukkan bahwa kedekatan dengan pusat pertumbuhan tidak otomatis mengangkat kesejahteraan perdesaan. Temuan ini sejalan dengan bukti bahwa konsumsi perdesaan tertinggal dari perkotaan (Zhou et al., 2012), bahwa barang yang tergolong kebutuhan pokok atau mewah dapat berbeda antara penduduk kota dan bukan kota (Yusof & Duasa, 2010), dan bahwa model konsumsi perdesaan memiliki determinan yang berbeda dari perkotaan (Sulaiman, Mat, et al., 2018). Pola konsumsi perdesaan juga peka terhadap kondisi ekonomi dan norma budaya setempat (Mehra, 2025).

Posisi Sulawesi dan Sulawesi Tenggara

Tabel 4 menyajikan profil enam provinsi di Sulawesi. Seluruh provinsi Sulawesi mencatat kenaikan pangsa pangan antara 2019 dan 2025, dengan rentang kenaikan dari

0,25 poin persen di Sulawesi Tengah hingga 4,26 poin persen di Gorontalo. Pada 2025, Sulawesi Barat memiliki pangsa pangan tertinggi di pulau ini (53,81 persen) sekaligus pengeluaran per kapita terendah kedua secara nasional (Rp1.069.314). Kombinasi ini menempatkan Sulawesi Barat sebagai wilayah dengan tekanan kesejahteraan paling berat di Sulawesi.

Tabel 4. Pangsa Pengeluaran Pangan Perkotaan dan Perdesaan di Sulawesi (persen), 2019 dan 2025

Provinsi	Kota 2019	Kota 2025	Desa 2019	Desa 2025	Total 2019	Total 2025	Pertumbuhan pengeluaran 2019–2025 (%)
Sulawesi Utara	46,37	48,71	53,68	54,61	49,36	50,93	22,6
Sulawesi Tengah	46,09	46,51	54,95	55,13	51,40	51,65	27,7
Sulawesi Selatan	43,86	45,23	52,40	53,60	47,72	48,90	32,9
Sulawesi Tenggara	42,21	45,35	50,87	52,51	46,53	49,12	29,7
Gorontalo	40,79	44,11	50,22	56,03	45,17	49,43	31,2
Sulawesi Barat	46,54	46,93	55,93	56,50	52,96	53,81	27,1
Indonesia	**45,90**	**46,04**	**55,59**	**56,85**	**49,14**	**49,42**	**34,7**

Keterangan: pertumbuhan pengeluaran dihitung dari pengeluaran per kapita sebulan nominal. Sumber: BPS (2019, 2025), diolah.

Sulawesi Tenggara memperlihatkan pergeseran yang perlu dicermati. Pangsa pangannya naik dari 46,53 persen pada 2019 menjadi 49,12 persen pada 2025, kenaikan terbesar ketiga di antara 32 provinsi dengan wilayah tetap. Pertumbuhan pengeluaran per kapita nominalnya (29,7 persen) juga lebih rendah daripada rata-rata nasional (34,7 persen), sehingga peringkat pengeluarannya turun dari ke-25 dari 34 provinsi menjadi ke-31 dari 38 provinsi. Kenaikan pangsa pangan terutama terjadi di perkotaan, dari 42,21 menjadi 45,35 persen, sedangkan di perdesaan naik dari 50,87 menjadi 52,51 persen. Selisih perdesaan–perkotaan memang menyempit dari 8,66 menjadi 7,16 poin persen, tetapi penyempitan ini terjadi karena kondisi perkotaan memburuk, bukan karena perdesaan membaik.

Penurunan relatif di perkotaan Sulawesi Tenggara berlangsung di tengah ekspansi industri pengolahan nikel di provinsi ini. Penelitian ini tidak menguji hubungan sebab-akibat, tetapi pola tersebut memunculkan dugaan bahwa pertumbuhan sektor padat modal belum tersalur menjadi perbaikan struktur konsumsi rumah tangga perkotaan secara luas. Dugaan lainnya adalah bahwa arus pendatang dan kenaikan biaya hidup di kawasan industri menekan porsi anggaran nonpangan. Temuan Nurhaliza et al. (2026) tentang heterogenitas elastisitas antarprovinsi di Sulawesi, termasuk elastisitas Gorontalo yang terkuat, memperkuat argumen bahwa kebijakan kesejahteraan di Sulawesi perlu disesuaikan dengan konteks tiap provinsi.

Implikasi Kebijakan

Temuan di atas memiliki tiga implikasi. Pertama, pangsa pangan perlu dipantau sebagai indikator pelengkap ketimpangan wilayah karena menangkap tekanan kesejahteraan yang tidak terlihat dari pengeluaran nominal. Kedua, provinsi dengan pangsa pangan di atas 55 persen, yaitu Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Aceh, serta wilayah perdesaan dengan selisih perdesaan–perkotaan yang besar perlu menjadi prioritas perlindungan sosial, termasuk menjaga keterjangkauan dan stabilitas harga bahan pokok (Farandy et al., 2026). Ketiga, karena respons konsumsi terhadap pendapatan berbeda menurut provinsi dan kelompok pendapatan, kebijakan yang seragam kurang efektif dibandingkan intervensi yang disesuaikan dengan konteks wilayah (Nurhaliza et al., 2026). Bagi daerah dengan industri yang tumbuh pesat seperti Sulawesi Tenggara, pertumbuhan perlu dipastikan ikut memperbaiki kualitas konsumsi rumah tangga (Yang et al., 2024).

SIMPULAN

Pangsa pengeluaran pangan nasional bertahan di kisaran 49–50 persen sepanjang 2019–2025, walaupun pengeluaran per kapita nominal naik 34,7 persen. Ketimpangan antarwilayah melebar pada tiga dimensi. Antarprovinsi, koefisien variasi pada 32 provinsi dengan wilayah tetap naik dari 7,75 menjadi 8,33 persen, provinsi dengan pangsa pangan di atas 50 persen bertambah dari 16 menjadi 18, dan 24 provinsi mencatat kenaikan pangsa pangan. Antara perkotaan dan perdesaan, selisih nasional naik dari 9,69 menjadi 10,81 poin persen. Lintas provinsi, hubungan negatif antara pengeluaran per kapita dan pangsa pangan menguat dari $r = –0,69$ menjadi –0,78, sehingga struktur konsumsi makin tegas memisahkan provinsi kaya dan miskin. Di Sulawesi, seluruh provinsi mencatat kenaikan pangsa pangan, dengan kenaikan terbesar di Gorontalo dan Sulawesi Tenggara. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah pusat dan daerah menggunakan pangsa pangan sebagai indikator pemantauan kesejahteraan wilayah di samping pengeluaran per kapita dan angka kemiskinan, serta memprioritaskan perlindungan harga bahan pokok di provinsi dan wilayah perdesaan dengan pangsa pangan tinggi. Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan data agregat provinsi dan nilai nominal, serta pada sifat analisis yang deskriptif. Penelitian lanjutan disarankan menggunakan data mikro Susenas, pengeluaran riil yang disesuaikan dengan indeks harga regional, dan analisis kausal untuk menjelaskan faktor penentu kenaikan pangsa pangan di provinsi seperti Sulawesi Tenggara dan Gorontalo.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, B., Achsani, N. A., Martianto, D., Sari, L. K., & Firdaus, A. H. (2019). The Future Of Indonesian Food Consumption. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, *8*(1), 71–102.

Aryal, A., & Aryal, B. (2023). Income Distribution And Its Effect On Food Expenditure, Non-Food Expenses And Savings In Households Of A Developing Economy. *Journal Of Economics, Finance And Accounting Studies*, *5*(1), 1–16. Https://Doi.Org/10.32996/Jefas.2023.5.1.1

Badan Pusat Statistik. (2019). *Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia Per Provinsi Berdasarkan Hasil Susenas Maret 2019.*

Badan Pusat Statistik. (2020). *Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia Per Provinsi Berdasarkan Hasil Susenas Maret 2020.*

Badan Pusat Statistik. (2021). *Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia Per Provinsi Berdasarkan Hasil Susenas Maret 2021.*

Badan Pusat Statistik. (2022). *Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia Per Provinsi Berdasarkan Hasil Susenas Maret 2022.*

Badan Pusat Statistik. (2023). *Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia Per Provinsi, Maret 2023.*

Badan Pusat Statistik. (2024). *Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia Per Provinsi Berdasarkan Hasil Susenas Maret 2024.*

Badan Pusat Statistik. (2025). *Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia, Maret 2025.*

Clements, K. W., & Selvanathan, S. (1992). *Understanding Consumption Patterns* (Discussion Paper No. 92.13). Economic Research Centre, Department Of Economics, The University Of Western Australia.

Farandy, A. R., Agustian, A., Rachman, B., Purba, H. J., Rachmawati, R. R., Inayah, I., Muslim, C., Yaumidin, U. K., Hartono, M. D., Suharyon, Qomariah, R., & Muslimin. (2026). Changes In Household Food Consumption Patterns And Demand Elasticities In Indonesia: Implications For Policy. *Social Sciences & Humanities Open*, *13*, 103036. Https://Doi.Org/10.1016/J.Ssaho.2026.103036

Kaber-Hriday, A. H. M. S., & Islam-Liton, M. R. (2024). Testing The Engel's Law On The Consumption Pattern Of The People Of Tangail Sadar Upazila In Bangladesh. *Semestre Económico*, *13*(1), 4–10. Https://Doi.Org/10.26867/Se.2024.V13i1.159

Mehra, R. (2025). An Analysis Of Literature Review Of Consumption Pattern Of Durable Goods In Rural India. *International Journal Of Advanced Research In Management*, *16*(2), 30–57. Https://Doi.Org/10.34218/IJARM_16_02_002

Nikiforov, A. A. (2025). The Development Of Consumption Types In The Context Of Global Changes. *Business Inform*, (3), 320–327. Https://Doi.Org/10.32983/2222-4459-2025-3-320-327

Nurhaliza, S., Ichwan, M., Yunus, R., Taqwa, E., & Sading, Y. (2026). Income Elasticity Of Food Expenditure Among Urban Households In Sulawesi: Evidence From Engel's Law. *Priviet Social Sciences Journal*, *6*(2), 512–526. Https://Doi.Org/10.55942/Pssj.V6i2.1424

Park, E., & Kwon, K. H. (2026). Consumption Patterns And Product Format Preferences Of Inner Beauty Functional Foods Among Korean Adults. *Foods*, *15*(10), 1820. Https://Doi.Org/10.3390/Foods15101820

Reina Paz, M. D., & Rodríguez Vargas, J. C. (2023). Main Theoretical Consumer Behavioural Models. A Review From 1935 To 2021. *Heliyon*, *9*, E13895. Https://Doi.Org/10.1016/J.Heliyon.2023.E13895

Reisch, L. A., & Zhao, M. (2017). Behavioural Economics, Consumer Behaviour And Consumer Policy: State Of The Art. *Behavioural Public Policy*, *1*(2), 190–206. Https://Doi.Org/10.1017/Bpp.2017.1

Simnica, M. (2021). The Role Of Behavioral Economics On Consumption And Consumer Choice Behavior. *Anglisticum Journal (IJLLIS)*, *10*(1), 83–89. Https://Doi.Org/10.5281/Zenodo.4548892

Sulaiman, Y., Mat, N. K. N., & Ghani, N. H. A. (2018). Consumption Pattern Model Of Malaysian Consumers: How It Look Alike? *International Journal Of Economics, Business And Management Research*, *2*(4), 602–618.

Sulaiman, Y., Shamsudin, A. S., Kheng, Y. K., & Othman, A. R. (2020). Consumption Pattern Model For Malaysian Consumers. *WSEAS Transactions On Environment And Development*, *16*, 341–370. Https://Doi.Org/10.37394/232015.2020.16.36

Yang, X., Sicular, T., & Gustafsson, B. (2024). China's Prosperous Middle Class And Consumption-Led Economic Growth: Lessons From Household Survey Data. *The China Quarterly*, *258*, 479–494. Https://Doi.Org/10.1017/S0305741023001261

Yusof, S. A., & Duasa, J. (2010). Consumption Patterns And Income Elasticities In Malaysia. *Malaysian Journal Of Economic Studies*, *47*(2), 91–106.

Zhang, H. (2024). Analysis Of Young Consumers' Consumption Behavior From The Perspective Of Behavioral Economics. *Highlights In Business, Economics And Management*, *42*, 30–36.

Zhou, Z., Tian, W., Wang, J., Liu, H., & Cao, L. (2012). *Food Consumption Trends In China.* Australian Government Department Of Agriculture, Fisheries And Forestry.